



## Koperasi Digelontor Dana Penyertaan Modal Rp 125 Juta

SEMARAPURA, NusaBali

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Klungkung menggelontor dana penyertaan modal kepada empat koperasi di Klungkung. Setiap koperasi akan menerima bantuan dana Rp 125 juta. Penyertaan modal ini merupakan salah satu langkah Pemkab melalui Dinas Koperasi untuk memotivasi pengelola koperasi agar memiliki struktur keuangan permodalan yang kuat.

Pasalnya, belakangan ini banyak koperasi yang mengalami 'sakit'. Dari 136 koperasi di Klungkung, 21 koperasi dalam kondisi 'sakit'. Dari 21 koperasi itu, 14 koperasi siap dihapuskan. Koperasi yang diusulkan untuk dihapuskan karena tidak menggelar rancangan akhir tahun (RAT) selama 5 tahun lebih.

Oleh karena itu, Dinas Koperasi Klungkung kian gencar memberikan pembinaan kepada pengelola koperasi agar koperasi 'sakit' tidak sampai bertambah.

Selain itu sejumlah koperasi yang memenuhi persyaratan akan diberikan penyertaan modal. Hal itu diakui Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Klungkung, I Wayan Ardiasa. "Program penyertaan modal ini sudah dilakukan sejak tahun 2014 lalu. Untuk tahun ini akan diberikan penyertaan modal kepada empat koperasi di mana setiap koperasi mendapat Rp 125 juta," ujarnya, Jumat (1/9).

Empat koperasi yang rencananya akan mendapat penyertaan modal tersebut adalah Koperasi Jaya Werdi, Arta Wiguna, Panca Satya, dan KSU Amerta.

Koperasi yang diberikan bantuan tersebut harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Di antaranya sudah berbadan hukum, minimal memiliki 20 anggota, kondisinya tergolong cukup sehat dan sehat.

Lebih lanjut dipaparkannya, penyertaan modal sebesar Rp 125 juta tersebut diberikan tidak secara cuma-cuma. Mereka berkewajiban membayar bunga sebesar enam persen per tahun atau sekitar 0,5 persen per bulan dari total modal penyertaan yang telah diberikan.

Pada tahun ke lima, penyertaan modal tersebut sudah harus dikembalikan. Lima tahun, penyertaan modal itu akan jatuh tempo dan bisa diperpanjang dengan kurun waktu yang ditentukan tim. Setiap koperasi mendapat dua kali penyertaan modal. Diakui, hingga saat ini belum ada koperasi yang sampai tidak bisa mengembalikan penyertaan modal tersebut. Tapi kalau koperasi yang terlambat mengembalikan penyertaan modal itu ada dan itu akan tetap dibina. Diharapkan dengan adanya dana penyertaan modal ini, koperasi-koperasi di Kabupaten Klungkung bisa memiliki struktur keuangan permodalan yang kuat. **wa**

Edisi : Sabtu, 2 Sept 2017

Hal : 6



## Mobil Dinas Anggota DPRD Bali 'Dicabut'

★ Diganti dengan Dana Transportasi

DENPASAR, NusaBali

Diberlakukannya PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi DPRD, memaksa fasilitas mobil dinas bagi anggota DPRD Bali harus dikembalikan ke pemerintah. Sebagai gantinya, anggota Dewan mendapatkan dana transportasi.

Pencabutan fasilitas mobil dinas ini berlaku bagi 51 anggota DPRD Bali. Sedangkan 4 Pimpinan DPRD Bali mendapat pengecualian, mobil dinas tidak dicabut, karena fasilitas itu melekat sesuai dengan PP

18/2017. Keempat Pimpinan Dewan itu masing-masing Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama (dari Fraksi PDIP), serta para Wakil Ketua DPRD Bali yakni Nyoman Sugawa Korry (Fraksi Golkar), IGB Alit Putra (Fraksi Demokrat), dan Jro Komang Swastika (Fraksi Gerindra).

Bocoran yang diperoleh NusaBali, Jumat (1/9), mobil dinas jenis Toyota Innova berjumlah 51 unit milik anggota DPRD Bali tersebut kini

*Bersambung ke Hal-15 Kolom 1*

## Mobil Dinas Anggota DPRD Bali 'Dicabut'

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

dalam proses penarikan. "Beberapa unit mobil dinas di antaranya sudah ada pengembalian dari anggota Dewan. Ada juga yang belum mengembalikan," ujar sumber NusaBali di lingkaran DPRD Bali kemarin. Betulkah?

Saat dikonfirmasi NusaBali terpisah, Jumat kemarin,

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Bali, Wayan Suarjana, mengaku rencana penarikan fasilitas mobil dinas bagi 51 anggota Dewan tersebut.

Suarjana mengatakan, mobil dinas dicabut sesuai amanat PP 18/2017. Sebab, fasilitas mobil dinas sudah berganti dengan uang transportasi.

"Sesuai dengan PP 18/2017, kan fasilitas mobil dinas bagi anggota Dewan

dialihkan ke dana transportasi. Itu dasar hukumnya. Angka pasti untuk tunjangan transportasi ini, saya lupa," ujar Suarjana.

Menurut mantan Kadispenda Provinsi Bali ini, mobil dinas bagi anggota Dewan nanti dikembalikan kepada Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah Provinsi Bali. Mobil dinas sekarang masih dipakai,

menunggu proses untuk pengembalian. Istilahnya pengembalian, bukan dicabut.

Suarjana menambahkan, mobil dinas yang akan dicabut tersebut sebanyak 51 unit. Sedangkan mobil dinas untuk unsur Pimpinan Dewan, statusnya melekat sebagai fasilitas pimpinan. "Ya, mobil dinas untuk Pimpinan Dewan sifatnya

melekat, sesuai aturan PP 18/2017," ujar birokrat asal Banjar Kutabali, Desa Tajen, Kecamatan Penebel, Tabanan ini. Ditanya soal nanti difungsikan sebagai apa 51 mobil dinas anggota Dewan ini, menurut Suarjana, itu kewenangan Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah Provinsi Bali.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah Provinsi

Bali, IB Ngurah Arda, mengatakan DPRD Bali sudah diminta menyiapkan proses pengembalian mobil dinas. "Saya masih koordinasikan dengan Biro Umum dan Pak Sekda (Tjokorda Ngurah Pемыun). Nanti tunggu proses penyerahan dulu," ujar Gus Ngurah Arda saat dikonfirmasi terpisah, Jumat kemarin.

Menurut Ngurah Arda, mobil dinas yang sudah dikem-

balikan oleh anggota DPRD Bali akan dicatatkan dalam berita acara. Proses berita acaranya itu dengan Sekda Provinsi Bali. Setelah itu, mobil dinas akan difungsikan kembali. "Setelah ke Sekda, lanjut ke Biro Umum dulu. Nanti kalau mau didistribusikan kepada dinas-dinas, dibuatkan berita acaranya. Kami di Badan Pengelolaan Aset kan hanya mencatatkan aset itu," katanya. **nat**

Edisi : Sabtu, 2 September 2017

Hal : 1 dan 15